

BAB IV

KEPENTINGAN NASIONAL IRAN TERHADAP SURIAH

Konflik yang terjadi di Negara Suriah pada masa pemerintahan Bashar Al Assad, lalu menjelaskan sejarah hubungan kedua Negara hingga pro dan kontra oleh Negara-negara lain atau lembaga internasional termasuk sanksi dari PBB terhadap Suriah, kemudian sikap yang diambil oleh Iran dan Negara yang mendukung atau Negara-negara yang menentang pemerintahan Bashar al Assad

Kepentingan Nasional secara singkat dapat diartikan sebagai hal-hal yang memberikan keuntungan terhadap Negara. Dapat berupa semua kegiatan, keadaan dan keputusan yang menguntungkan Negara tersebut. Hal ini merupakan tujuan atau ambisi dari Negara yang bisa dimanifestasikan kedalam berbagai macam bentuk, utamanya adalah bertahan hidup dan keamanan Negara, selain itu tujuan untuk memperoleh kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan kekuatan ekonomi juga berperan dalam menentukan kepentingan nasional sebuah negara. Bentuk manifesto dari kepentingan nasional suatu Negara bisa sangat beragam tidak hanya terbatas pada keamanan dan ekonomi tetapi dapat juga berbentuk kepentingan ideologi, moralitas dan legalitas.

Iran merupakan salah satu negara Timur Tengah non-Arab yang memiliki kepentingan militer dan ideologi serta hubungan diplomatik sangat erat dengan Suriah di bawah pimpinan rezim otoriter Presiden Hafez al-Assad dan BasharAl-Assad. Hal ini terjadi karena persamaan ideologi (madzhab) antara pimpinan kedua negara, Islam Syi'ah, serta perbatasan teritorial yang cukup dekat karena hanya terpisah oleh Iraq. Iran dan Suriah juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel namun sama-sama

memiliki hubungan politik, militer dan ideologis yang sangat erat dengan faksi Hezbollah di Lebanon, kelompok politisi dan ulama pimpinan Perdana Menteri Nuri Al-maliki dan Muqtada As-Sadr di Iraq serta hubungan pragmatis dengan faksi Hamas di Palestina. Meskipun mayoritas rakyat Suriah merupakan Muslim Sunni (85%) namun pemerintahan Suriah yang dikuasai oleh minoritas kelompok Syi'ah (15%) merupakan aset strategis dan potensial bagi Iran untuk memperluas hegemoni ideologi dan politiknya di kawasan Timur Tengah.

Politik diaspora Iran di timur tengah semakin gencar dilakukan pasca runtuhnya rezim militeristik Saddam Husein di Iraq, tumbangnya rezim Muammar Qaddhafi di Libya serta jatuhnya rezim Husni Mubarak di Mesir. Hal ini terbukti dengan dibukanya kembali hubungan diplomatik antara Iran dan Mesir, di masa Presiden Muhammad Mursi, untuk pertama kalinya sejak pembekuan hubungan diplomatik kedua negara di masa kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Nasser. Suriah merupakan target utama dari politik diaspora Iran di kawasan timur tengah. Posisi strategis dan potensial Suriah yang berbatasan langsung dengan Iraq, Lebanon, Turki, Yordania dan Israel merupakan batu loncatan bagi Iran jika ingin memperluas hegemoni dan pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah. Hal ini terbukti dari kebijakan politik luar negeri Iran yang mendukung total rezim Assad dan menolak keras berbagai bentuk intervensi militer asing terhadap kedaulatan teritorial Suriah. Bahkan Iran disinyalir telah melatih milisi pro pemerintah dan tentara reguler Suriah serta menempatkan sejumlah tentara di Suriah untuk mendukung rezim Assad dalam pertempuran melawan gerilyawan dan oposisi Suriah.

Iran bermaksud menegaskan kembali dukungannya terhadap Suriah sembari memberikan peringatan keras dan tegas kepada AS agar bertindak rasional dan berpikir

mendalam terkait resiko fisik dan non-fisik yang akan dialami atau diderita oleh AS jika tetap nekad melakukan serangan terhadap rezim Assad di Suriah.⁵³

A. Memelihara Kepentingan Ekonomi

Negara Iran merupakan salah satu Negara yang kuat di kawasan Arab dan Timur Tengah, tidak saja dalam kekuatan militer tetapi juga dalam hal ekonomi. Sistem perekonomian Iran pada dasarnya bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam minyaknya. Setelah Revolusi tahun 1979, masih ada beberapa sistemik kesinambungan antara ekonomi yang berlaku selama Monarki Shah dan rezim baru Republik Islam, dengan keduanya bergantung pada pendapatan minyak dan keduanya memberikan negara peran penting dalam perencanaan dan menjalankan urusan ekonomi nasional. Namun demikian, para pemimpin Republik Islam memiliki tujuan untuk menciptakan struktur ekonomi baru yang akan membantu meningkatkan perekonomian Iran⁵⁴. Ekspor minyak menjadi pemasukan devisa terbesar bagi Negara, sekitar 80% dari total pendapatan, selain minyak ekspor gas alam menjadi pendapatan devisa kedua terbesar dan diikuti oleh pendapatan dari cukai. Pendapatan besar melalui sector Migas tidak langsung membuat Iran memiliki ekonomi yang kuat dan maju, hal ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah Iran. Ketergantungan akan ekspor Migas dan sanksi yang di berikan oleh PBB melalui AS, dengan membekukan asset luar negeri Iran dan juga pengucilan Iran dari perekonomian global berakibat sangat buruk teradap roda perekonomian. Ekonomi

⁵³Hamdani, M.I., 2013, Konflik Suriah dan Politik Diaspora Iran, NU Online <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.4-id.47669-lang.id-c.kolom-t.Konflik+Suriah+dan+Politik+Diaspora+Iran-.phpx>, diakses pada 22 Mei 2013.

⁵⁴ Anne Penketh, "Iran enters new year in sombre mood as economic crisis bites", (London: The Independent, 2008) hal.21

Iran perlahan namun pasti menuju ambang kehancuran, hal ini juga disebabkan oleh pergolakan ekonomi dalam negeri dan sistem ekonomi pemerintah yang tidak efisien.

Saat ini Iran dalam keadaan berbahaya, penggunaan devisa Negara yang terlalu fokus kepada pengembangan energi nuklir dan militer, mengakibatkan terbengkalainya sektor lain yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih karena dapat menambah devisa Negara, seperti sektor industri kecil, perbankan, pariwisata, dan juga pelayanan jasa lainnya. Sektor lain yang terbengkalai sebenarnya menjadi dasar perekonomian kebanyakan rakyat Iran, meskipun kita ketahui bersama bahwa terdapat dua golongan masyarakat di Iran berdasarkan strata ekonominya. Golongan saudagar minyak atau orang-orang kaya Iran yang terlalu kaya dan golongan miskin dan tak terpelajar. Jumlah mereka sangatlah berbeda, hanya sedikit orang yang mampu secara ekonomi di bandingkan dengan rakyat yang menderita karena kemiskinan. Orang-orang yang bergaji dan berupah rendah, dipaksa untuk membayar komoditas yang berharga terlalu tinggi dengan menjual rumah, peralatan dan mebel yang mereka punya, mengurangi tingkat konsumsi atau mengubah kebiasaan makan mereka dengan membeli lebih banyak makanan berbungkus yang dijual di pasar-pasar ransom jatah dengan harga resmi; dan jalan terakhirnya dengan meminjam uang atau mengorek-ngorek tabungan mereka.

Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya kesempatan bagi kalangan bawah untuk bisa memperoleh pendapatan atau penghidupan yang layak, karena semua roda perekonomian telah diatur dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara dan hanya menguntungkan sebagian orang saja (monopoli). Sektor privat atau swasta sama sekali tidak berkembang, mereka hanya terlibat dalam perekonomian Negara Iran dalam skala yang kecil dan pada level yang rendah. Akibat dari sanksi atau embargo ekonomi

terhadap Iran tidak hanya mengakibatkan menurunnya pendapatan Negara tetapi juga membuka kesempatan sektor lain untuk bermain di dalam pasar perekonomian Iran. Sektor ini adalah pasar gelap, dimana semua transaksi perekonomian yang terjadi tidak dilaporkan didalam kegiatan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di bawah radar, artinya mereka sama sekali tidak membayar pajak dan melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi pemerintah Iran, karena mereka kehilangan pendapatan dari sektor pajak yang seharusnya mereka terima. Belum lagi nilai tukar real yang semakin melemah setiap tahunnya dikarenakan keadaan ekonomi dalam negeri yang sangat memihak kalangan saudagar minyak dan juga akibat dari embargo ekonomi oleh Amerika Serikat.

Ekonomi Iran pada dasarnya adalah ekonomi percampuran antara ekonomi berdasar pada hasil minyak dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, ada pula beberapa pihak swasta yang memiliki perusahaan tetapi jumlah dan skalanya tidak terlalu besar. Pemerintah adalah pihak yang memegang kendali penuh atas peraturan dan kebijakan ekonomi demikian juga halnya dengan ekspor dan impor, pihak swasta hanya berperan sebagai pendamping dan tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan kebijakan atau pengembangan ekonomi.

Kerjasama ekonomi Iran dilakukan dengan ekspor minyak ke Negara-negara lain, diantaranya adalah China, Perancis, Russia, Jepang dan Korea Selatan. Kemudian setelah tahun 1990 Iran mengembangkan ekspor mereka ke Negara-negara seperti, Suriah, India dan Afrika Selatan. Pada era Mahmoud Ahmadinejad Iran mengalami peningkatan perekonomian dengan strategi ekonomi yang tidak hanya berfokus pada ekspor minyak tetapi juga mengembangkan industri pertanian, dan gas. Iran melakukan kerjasama

dengan Suriah dalam bidang ekonomi tidak hanya dengan menanamkan modal dalam bentuk uang tetapi juga pada sumber daya, pekerja terlatih dan buruh. Investasi ini dimulai tepatnya beberapa tahun sebelum konflik dalam negeri Suriah berkecambuk pada Maret 2011. Meskipun sejumlah uang dan sumber daya telah di alokasikan untuk berinvestasi di sarana transportasi dan infrastruktur, belumlah cukup menggambarkan kerjasama ekonomi antara Iran dan Suriah. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama yang terjalin antara keduanya tidak terbatas hanya dalam hal itu saja, seperti yang terjadi beberapa bulan sebelum konflik terjadi di Suriah, Iran menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan jalur pipa gas yang pengerjaannya dimulai dari Iran, nilai investasi ini berkisar \$ 10 Milyar⁵⁵ untuk menyalurkan gas alam membentang dari Iran melalui Libanon, lalu kedaerah Mediteranian dan akhirnya mencapai beberapa Negara Barat⁵⁶. Dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa Iraq dan Suriah akan mendapatkan bagian beberapa kubik meter gas alam setiap harinya. Proposal ini di gagas oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khomeini yang juga memberikan bantuan berupa dana bagi Suriah dengan mengalokasikan sekitar \$ 5,8 Milyar melalui lembaga bantuan Iran, Iran's Centre for Strategic Research (CSR), yang berkonsentrasi pada Iran strategi di enam bidang termasuk Studi Kebijakan Luar Negeri, studi Timur Tengah dan Persia, serta penelitian Politik Ekonomi Internasional.

Perjanjian lain yang terjadi sebelum krisis terjadi adalah proposal untuk mendirikan bank bersama di Damaskus, yang pembagiannya 60 persen dimiliki Iran dan

⁵⁵ Fulton, *Will dkk.* "Syria-Iran Foreign Relations." dari <http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Syria-Iran-foreign-relations>, diakses pada 2 November 2012.

⁵⁶ Ensher, Henry A. "Iran-Syria Relations and The Arab Spring," dari <http://www.Irantracker.org/foreign-relations/Iran-Syria-relations-and-arab-spring>, diakses pada 2 November 2012.

40 persen dimiliki Suriah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwasannya Iran dapat mengakses setiap informasi transaksi perbankan yang terjadi di Suriah, dan Suriah diijinkan untuk melakukan perdagangan dan transaksi dengan Negara Barat, sebelum adanya sanksi akibat konflik di Suriah. Wakil presiden Iran yang pertama, Mohammad Reza Rahimi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad, bahkan sempat berbicara mengenai wacana untuk mendirikan kubu ekonomi (economic bloc). Hasil dari proposal ini adalah penandatanganan perjanjian yang menyatakan akan focus pada perdagangan, investasi, statistik dan perencanaan, industry, air, perkapalan dan kereta api, teknologi komunikasi dan informasi, kesehatan, pertanian dan pariwisata.

TABEL 2

DATA PEREKONOMIAN IRAN DAN SURIAH

	Iran	Suriah
GDP Tingkat pertumbuhan riil	4,3%, perkiraan tahun 2007	3,5%, 2007
GDP per kapita (ppp)	12300 \$ 2007 est	4500 \$ 2007
GDP Komposisi menurut sektor	Pertanian 11%; Industri 45,3%; Jasa 43,7% 2007 est	Pertanian 24,6%; Industri 24,4%; Jasa 51%, 2007
Tenaga kerja	28,7 juta, 2006 est	5.457.000 2007
Tenaga kerja menurut pekerjaan	Pertanian 25%; Industri 31%; Jasa 45%, Juni 2007	Pertanian 26%; Industri 14%; Jasa 60% 2003
produk pertanian	Gandum, beras, biji-bijian, gula bit, gula tebu, buah-buahan, kacang-kacangan, kapas, produk susu, wol, kaviar	Gandum, barley, kapas, kacang, buncis, buah zaitun, gula bit, daging sapi, daging kambing, telur, unggas, susu
industri	Petroleum, petrokimia, pupuk, soda kaustik, tekstil, semen dan bahan bangunan lainnya, pengolahan makanan, besi dan	Petroleum, tekstil, pengolahan makanan, minuman, tembakau, fosfat batu pertambangan, semen, minyak biji

	fabrikasi logam non-ferrous	menghancurkan
produksi minyak	4.150.000 bbl / hari 2006 est	390.000 bbl / hari, perkiraan tahun 2007
konsumsi minyak	1,63 juta bbl / hari 2006 est	245.000 bbl / hari, perkiraan tahun 2007
ekspor minyak	2,52 juta bbl / hari 2006 est	150.000 bbl / hari, perkiraan tahun 2007
impor minyak	153.600 bbl / hari 2004	160.000 bbl / hari, perkiraan tahun 2007
Cadangan minyak terbukti	132500000000 bbl berdasarkan klaim Iran, 1 Januari 2006	2,5 miliar bbl 2007
komoditas ekspor	Petroleum 80%, kimia dan petrokimia produk, buah-buahan dan kacang-kacangan, karpet	Minyak mentah, produk minyak bumi, buah-buahan dan sayuran, serat kapas, pakaian, daging dan hewan hidup, gandum
impor	61300000000 \$ f.o.b. 2007 est	11490000000 \$ f.o.b. 2007 est
Cadangan devisa dan emas	\$ 69200000000	\$ 60390000000, 31 Desember 2007 est

Sumber : <http://www.gloria-center.org/2008/06/raphaeli-2008-06-06/>

Hubungan ekonomi yang terjalin antara Iran dan Suriah memiliki arti penting bagi kedua Negara, dimana kedua Negara bisa tetap saling melengkapi dan membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing terutama bagi Iran yang sejak lama telah dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan PBB. Sedangkan bagi Suriah keberadaan Iran sebagai teman dan rekan bisnis sangat membantu guna peningkatan kesejahteraan rakyat melalui investasi dan penanaman modal asing. Kondisi perekonomian Suriah walaupun juga terkena imbas dari adanya resesi ekonomi global, kondisinya masih terbilang bagus dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Tetapi seperti

yang terjadi di Mesir, situasi tersebut tidak menutupi fakta bahwa pemerintah tidak bisa secara signifikan mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan⁵⁷. Kemudian keadaan diperparah dengan terjadinya revolusi yang memicu konflik berkepanjangan. Pemasukan dari penjualan minyak berkurang terutama semenjak Uni-Eropa menerapkan larangan impor minyak dari Suriah sejak terjadinya konflik. Padahal minyak menyumbang 26% dari GDP Suriah. Lalu pada 2011, pemerintah mengeluarkan anggaran tambahan untuk tunjangan pegawai dan warga miskin demi menarik simpati masyarakat dari pihak oposisi. Tetapi hal itu menjadi *blunder* bagi pemerintah karena menyulut krisis fiskal dengan menyedot 30% dari anggaran 2012. Puncaknya, pada Mei 2012, harga bahan bakar minyak dan listrik untuk industri maupun rumah tangga dinaikkan demi menekan anggaran pemerintah yang membengkak. Hasilnya inflasi yang mencapai 32% dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat⁵⁸.

Iran menilai hubungan mereka dengan Suriah sangat penting, Hubungan ini akan berusaha dipertahankan oleh. Apalagi dalam kondisi Iran yang sedang mengalami embargo dan isolasi ekonomi internasional akibat dari program nuklirnya⁵⁹. Dengan demikian, Iran tentunya akan berupaya untuk mempertahankan Rezim Assad tetap berkuasa meskipun mereka lemah. Karena jika rezim ini jatuh dan pemerintahan berada di tangan oposisi, maka kepentingan ekonomi Iran akan terancam

⁵⁷World Bank, *Tunisia – Overview* (daring), <http://www.worldbank.org/en/country/syria/overview>, diakses pada 10 januari 2013.

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ Salah satu upaya untuk mengisolasi Iran dari perdagangan gas internasional adalah dengan dibentuknya proyek TAPI (Turkmenista, Afghanistan, Pakistan, dan India) oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk menghentikan kerjasama IPI (Iran, Pakistan, dan India). John Foster. "A Pipeline Through A Troubled Land: Afghanistan, Canada, And The New Great Energy Game." Canadian Centre for Poligy Alternatif (CCPA), Volume 3, No. 1 June 19, 2008 hal. 7-9

B. Menjalin Hubungan Pertahanan dan Keamanan

Hak sebuah Negara salah satunya adalah mempertahankan negaranya baik wilayah, sumber daya alam, rakyat hingga integritas bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan. Kewajiban setiap Negara untuk melindungi itu semua adalah sama, tak ada yang rela apabila keutuhan negaranya di ganggu oleh Negara lain atau siapapun. Demikian halnya dengan Negara Iran, sebagai Negara yang utuh dan berdaulat Iran berhak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna mewujudkan rasa aman bagi rakyatnya. Perwujudan dari keinginan mempertahankan kedaulatan ini adalah kebijakan, yang biasa dikenal dengan kebijakan nasional. Lebih luas lagi dimanifestasikan kedalam kebijakan politik luar negeri untuk hubungannya dengan dunia internasional. Iran memiliki kepentingan dan kebijakannya sendiri dalam menyikapi konflik yang terjadi di Suriah. Iran secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Bashar al Assad salah satu alasannya adalah kepentingan pertahanan dan keamanan. Iran merasa perlu terlibat dalam konflik ini karena mereka merasa terancam kepentingan mereka akan terganggu. Langkah Iran ini juga dimaksudkan guna mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dimasa depan, sehingga langkah cepat dan dini memang harus dilakukan.

Dalam kasus konflik Suriah yang melibatkan perang antara kaum reformis dan pemerintah, kebutuhan akan strategi perang, peralatan militer dan dana yang besar sangat dibutuhkan. Pemerintah Suriah membutuhkan semua bantuan dan dukungan yang ada guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Iran sebagai sahabat lama Suriah sangat tepat apabila diminta bantuannya, terlebih lagi mereka sudah sejak lama melakukan hubungan bilateral di segala bidang. Hal ini di sambut baik oleh Iran, yang secara sejarah maupun

kepentingan masa depan melihat Suriah sebagai bagian yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan eksistensi di kawasan, terutama masalah pertahanan dan keamanan.

‘Bila kita melihat kepentingan Iran dalam hal pertahanan dan keamanan dapat kita petakan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

Melindungi batas wilayah Negara, meskipun Suriah bukan merupakan wilayah kedaulatan Negara Iran tetapi posisi Suriah memiliki arti yang sangat penting bagi keutuhan wilayah Iran. Invasi AS beserta sekutunya terhadap Iraq membuat Iran waspada apabila setelah Iraq, merekalah target berikutnya. Keawaspadaan ini sangat beralasan karena hingga saat ini permasalahan pengembangan program nuklir masih menjadi perhatian dunia internasional dan alasan ini juga yang membuat Iran terkena sanksi ekonomi. Tidak menutup kemungkinan sanksi ini akan berkembang menjadi wujud nyata dilapangan bila melihat lambatnya proses negosiasi yang telah memakan waktu sangat panjang⁶⁰. Permusuhan Iran dengan Israel, memiliki sumberdaya alam melimpah hingga tudingan sebagai Negara pendukung terorisme adalah beberapa alasan kuat mengapa Iran bersiap diri menghadapi serangan dari luar. Apabila itu terjadi Iran akan membutuhkan semua bantuan yang mereka miliki termasuk dari teman mereka Suriah, dengan membantu Suriah saat ini tidak diragukan lagi mereka akan membantu Iran dimasa depan sebagai balas budi. Letak Suriah menjadi sangat strategis karena apabila Suriah jatuh ke tangan musuh dan mereka menyerang Iran, jarak mereka hana di batasi oleh Iraq yang mengakibatkan musuh menjadapat akses lebih mudah untk bergerak menujuIran dan

⁶⁰ Efraim Halevy, Iran’s Achilles’ Heel. 7 Februari 2012, http://www.nytimes.com/2012/02/08/opinion/to-weaken-iran-start-with-syria.html?_r=0 diakses pada 8 Desember 2012.

juga bantuan dari Hizbullah dan Hamas akan tertahan tidak dapat sampai ke Iran, seperti kita ketahui bahwa Hisbullah dan Hamas adalah teman Iran.

Melindungi kekuatan nasional, dalam ilmu hubungan internasional dikenal istilah *National Power* atau *kekuatan Nasional*, yang penggunaannya adalah untuk menacapai tujuan atau kepentingan nasional. Kekuatan nasional dapat di kategorikan menjadi dua hal, *soft power* dan *hard power*. Yang termasuk kedalam *soft power* diantaranya kekuatan ekonomi, ideologi, diplomasi hingga sumber daya alam, sedangkan *hard power* lebih identik dengan kekuatan real yang aplikatif seperti persenjataan dan tekhnologi militer. Iran secara terbuka melakukan pengembangan tekhnologi nuklir dengan membangun fasilitas dan pengayaan akan uranium, hal ini mengakibatkan reaksi keras dari dunia internasional diantaranya AS, Eropa dan PBB. Jalan diplomatik dan mediasi telah ditempuh guna mencari solusi akan masalah ini, tetapi hingga kini tidak ada penyelesaian yang signifikan sehingga membuat masalah ini semakin pelik dan berlarut-larut. Kemungkinan terbesar langkah yang akan diambil oleh PBB adalah melakukan invasi terhadap Iran guna menyelesaikan masalah ini. Nuklir bagi Iran merupakan salah satu kekuatan Nasional, kepentingan dalam pengembangan teknologi nuklir ini adalah untuk dapat berbicara lebih dalam konstelasi geopolitikan dunia 'dan sebagai faktor penyeimbang serta alat pertahanan Negara yang efektif untuk menghalau musuh-musuh Iran, atau setidaknya memberikan efek takut kepada musuh mereka agar tidak melakukan serangan dan invasi. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan semangat perdamaian dunia dan dianggap sebagai ancaman bagi keamanan wilayah.

Menghalau pemberontakan suku Kurdi, Kurdi merupakan ras Aryan, yaitu Indo-Eropa yang telah menempati wilayah Kurdistan sejak 2000 tahun sebelum Masehi.

Jumlah mereka kini hampir mencapai 20 juta jiwa. Orang Kurdi secara tradisional hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari daerah pegunungan Turki dan Iran ke dataran Mesopotamia sambil mengembala ternak dan bertani. Akan tetapi, di saat pasca-Perang Dunia I negara-negara menetapkan garis perbatasannya. Karena itu suku Kurdi mulai terdesak dan terpaksa meninggalkan pola hidup tradisionalnya dan mulai berdiam diri di pemukiman-pemukiman di beberapa Negara. Di mata dunia, Kurdi adalah potret etnis yang malang. Mereka tercerai-berai di seantero empat negara berbeda: Turki bagian Timur, Suriah dan Armenia, Irak Utara, dan Iran Barat Laut.⁶¹ Sedihnya lagi, karena minoritas di keempat negara itu, sering kali kepentingan bangsa Kurdi diabaikan oleh pemerintah masing-masing negara tempat mereka berdiam. Akibatnya gampang ditebak, mereka ingin memisahkan diri dari negara induk masing-masing lalu mendirikan negara Kurdi. Tentu saja keinginan mereka, yang dinilai sebagai gerakan separatisme, segera ditentang oleh pemerintah masing-masing negara. Bahkan tidak hanya ditentang, tetapi juga ditumpas.

Perbedaan keturunan antara suku Arab dan Kurdi seringkali menjadi pangkal meletusnya kerusuhan terutama di wilayah Irak. Selain dua suku utama itu, Irak juga memiliki etnik lain seperti Turkoman, Persia, Sabaeen, dan Yazidis. Orang Arab telah memerintah Irak sejak 1958, ketika pecah revolusi yang mengakhiri kekuasaan Inggris, yang bersekutu dengan suku Kurdi dalam upaya mempertahankan kekuasaan di negara Abu Nuwas tersebut. Setelah revolusi, pemerintah Irak berusaha menyatukan suku Kurdi ke dalam pemerintahan, tapi kelompok ekstrem suku itu menolak bergabung sehingga meletuslah perang sejak saat itu. Sampai kini suku Kurdi di Irak telah beberapa kali

⁶¹ Sidik Jatmika, *Op Cit* hlm:114

beralih aliansi antara pemerintah di Baghdad dan di Teheran, sementara pada saat yang sama perang antar-suku juga tak kunjung reda. Hal ini dialami juga oleh Iran yang berusaha untuk mempertahankan wilayahnya dari pemberontakan Kurdi dan yang harus dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan ketiga Negara lainnya termasuk Suriah guna mengatasi masalah ini.

Peranan Suriah menjadi sangat penting bagi Iran selain sebagai rekan bisnis yang menghasilkan pendapatan guna mendukung biaya pengembangan teknologi nuklir yang sangat besar juga sebagai garda terdepan untuk mengantisipasi invasi musuh Iran karena lokasinya yang strategis di kawasan Arab. Suriah memiliki kepentingan yang sama dengan Iran terhadap kelangsungan wilayah mereka dari serangan suku Kurdi yang ingin merebut kembali wilayah mereka di sebagian wilayah Iran Irak, Suriah dan Turkey.

C. Menjaga Eksistensi Ideologi Syi'ah

Dari segi bahasa "ideologi" dari kata-kata Latin "Idea" atau Yunani "Idein" yang berarti "Pemikiran, Konsepsi, Keyakinan, Pendapat, Gambaran Mental atau Rencana", dan logos berarti : "Pengetahuan, alasan, Ilmu atau Pengetahuan", sehingga dapat diartikan bahwa Ideologi adalah: (1) Sebuah sistem tertentu tentang pemikiran terutama mengenai masalah sosial dan politik. (2) Ilmu pengetahuan tentang pemikiran dan cara pemahamannya, "Science of Ideas".⁶²

Dibidang filsafat dan politik kemudian ideologi memiliki arti lebih luas namun tertentu sifatnya dan sangat normatif. Dalam "The Oxford Companion to Philosophy" diberikan definisi sebagai berikut :

⁶² <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ideology> diakses pada 23 November 2012.

*"A collection of beliefs and values held by an individual or group for other than purely epistemistic reasons"*⁶³

"sebuah untaian kekayaan dan nilai yang diyakini seseorang atau kelompok untuk dijadikan lebih dari sekedar alasan-alasan pengetahuan murni".

Ini berarti bahwa ideologi bisa beranekaragam isinya tergantung para pemiliknya, sedang terbentuknya jelas akan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi setempat ketika ideologi itu terbentuk serta kepentingan para pembentuknya sendiri. Ideologi karenanya bisa bersifat sangat sempit dan personal dan ditempat lain bisa sangat luas cakupan materi maupun tempo waktunya. Ideologi bisa hanya sebagai pegangan pribadi seseorang maupun jadi pedoman kelompok masyarakat, bahkan sebuah "Negara-Bangsa".

Selanjutnya ideologi setelah mantap dalam pembentukannya akan berfungsi normatif yang bisa mengikat masyarakat luas. Penggunaan ideologi secara normatif akan melibatkan dua elemen pokok : (1) Unsur penyebar-luasan keyakinan dan nilai ideologi untuk mengarah pada stabilisasi dan legitimasi. (2) Unsur yang mengandung keyakinan dan nilai ideologis sebagai symbol kritisisme menghadapi masalah yang berkembang.

Berdasarkan pengertian diatas ideologi Negara Islam Iran berarti sebuah sistem politik dan sosial yang dianut oleh pemerintahan Islam Iran. Bila kita telaah lebih lanjut makna ideologi yang erat hubungannya dengan kepentingan nasional memiliki tujuan untuk (1) Melindungi pola hidup masyarakat, (2) Menjaga sistem politik, hukum dan pemerintahan, (3) Melestarikan nilai ajaran agama, paham dan budaya, (4) Menjaga penerapan sistem ekonomi, (5) Mengembangkan konsep kebebasan, keadilan dan kemanusiaan. Dalam perkembangan Negara Iran, ideologi memiliki arti penting terutama

⁶³ Ted Honderich, *"The Oxford Companion to Philosophy"*. Oxford University Press, Oxford New York. 2005, hal 392.

pada masa teradinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Ideologi Islam menjadi dasar terjadinya revolusi di Iran, dengan mengusung ideologi Syiah sebagai landasan untuk menjatuhkan pemerintahan sebelumnya.

Revolusi Islam Iran merupakan peristiwa sejarah dimana ideologi berperan sangat dominan didalamnya, pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Shah Pahlevi digantikan oleh pemerintahan republik yang berdasar pada ajaran agama yaitu agama Islam. Lahirlah Republik Islam Iran dipimpin oleh seorang pemuka agama yang kharismatik Ayatullah Khomeini, inti dari perubahan pemerintahan Iran yang terjadi dengan cara revolusi adalah perubahan ideologi, yang pada masa pemerintahan Shah Pahlevi nilai-nilai agama Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Iran mulai hilang dan nilai-nilai perjuangan norma Islam sudah dihancurkan dengan budaya barat yang semakin lama menjadi kegiatan kehidupan di pemerintahan monarki Shah Pahlevi, serta dukungan pemerintah terhadap Amerika yang sangat membuat rakyat Iran gerah. Pada puncaknya adalah gerakan revolusi yang dilakukan masyarakat Iran dipimpin oleh ulama Islam Iran, bersama-sama turun kejalan untuk melakukan perjuangan melalui perang jalanan demi memperjuangkan ideologi Islam duduk kembali di pemerintahan. Alternatif yang ditawarkan oleh para ulama yang dipimpin oleh ulama berpengaruh dan sangat kharismatik Ayatullah Khomeini sangatlah menggugah semangat rakyat Iran yang telah lama merasakan ketidakadilan, serta menampar kesadaran rakyat untuk segera bertindak dan tidak lagi berlama-lama berada dibawah kuku besi monarki pemerintah Pahlevi. Tujuan perjuangan ini adalah mengembalikan Iran menjadi Negara yang bermartabat, tidak tunduk serta patuh terhadap Amerika dan yang terpenting adalah mengembalikan nilai-nilai Islam Syiah sebagai ideologi dasar kehidupan dan pemerintah

Iran. Setelah kemenangan kaum ulama Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini maka dimulai pula perjalanan pemerintahan Republik Iran yang berdasar pada ajaran agama Islam, dimana ideologi Islam Syiah menjadi ideologi dasar pemerintahan dan kehidupan rakyat.

Dalam Islam sendiri terdapat beberapa aliran diantaranya adalah Syiah dan Ahli sunnah wal jama'ah (Sunni). Syiah dan Sunni memiliki cabang masing-masing, di Syiah ada kaisaniyah, zaidiyah, imamiyah, ghulah, ismailiyah dan di Sunni ada Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Syiah menurut bahasa artinya pengikut atau penolong, kemudian kelompok penolong atau kelompok pengikut di sebut Syiah. Syiah Imamiyah Dubelas adalah sebuah kelompok umat Islam yang berpegang teguh kepada keyakinan bahawa Ali yang berhak mewarisi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar, dan Ustman. Khalifah harus berasal dari satu keturunan keluarga Ali Bin Abu Thalib. Diyakininya ada 12 imam, imam yang terakhir kata mereka menghilang masuk dalam gua di Samara. Aliran Imamiyah inilah yang bertentangan dengan Sunni dalam pemikiran dan ide-idenya yang spesifik. Mereka sangat berambisi menyebarkan madzhabnya ke segenap penjuru dunia. Iran Seperti kita ketahui bersama adalah Negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia, terutama Syiah Imamiyah, pemerintahan mereka berdasarkan ideologi Syiah dimana pemimpin Negara adalah Presiden dengan Imam atau Mullah sebagai pemegang tangkup kekuasaan tertinggi. Syiah sebagai sebuah ideologi dan pemikiran tidak lahir secara instan, akan tetapi lahir dari sebuah proses waktu yang panjang dan fase sejarah yang lama.

Permulaan ideologi dan prinsip dasar dari ajaran Syiah dimulai oleh kaum Saba'iyah (mengadopsi ajaran Yahudi) seperti yang tercantum dalam kitab-kitab Syiah.

Aliran Saba'iyah adalah aliran yang mengkultuskan Sayidina Ali yang didirikan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura memeluk agama Islam. Dia adalah orang pertama yang mewajibkan kepemimpinan Ali sebagai Washi atau Khalifah dan mengharamkan khalifah lainnya. Ideologi Syiah di Iran menjadi pegangan hidup baik di pemerintahan dimana perkataan atau keputusan Mullah adalah wajib dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Hal ini yang membuat ajaran Syiah dianggap bukan sebagai ajaran Islam melainkan penyimpangan dari Islam itu sendiri, karena mereka terlalu mengagungkan Imam mereka bahkan lebih dari para Nabi itu sendiri. Peraturan-peraturan, norma-norma serta nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat Iran (menurut kaum Sunni) sangat bertentangan dengan ajaran Islam seperti mereka berbeda tentang rukun Islam dan rukun Iman.

Ideologi Syiah Iran menjadi salah satu landasan mengapa pemerintah Iran mendukung pemerintahan Suriah yang beraliran Syiah garis keras otoriter sedangkan mayoritas rakyatnya beraliran Islam Sunni. Suriah terdiri dari, 74% Sunni 13 % Alawi dan Syiah dan 10% Kristen serta 3% etnis Druze (agama yang hanya ada di Suriah). Suriah adalah Negara strategis bagi Iran, apabila Presiden Bashar al Assad bisa diturunkan maka besar kemungkinan kekuatan sunni yang akan merebut kekuasaan, sehingga kiblat politik Suriah pasti akan berubah. Kepentingan untuk menyebarkan dan memelihara Ideologi Syiah di Negara lain demi kepentingan menjaga keberadaanya menjadi sangat penting di mata Pemerintah Iran. Posisi Iran yang tidak menguntungkan karena selalu sendiri dalam melakukan perjuangannya membuat Suriah sebagai satu-satunya kawan yang perlu dijaga dan dilindungi. Demi mempertahankan ideologi dan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap Suriah, Iran yang notabennya sangat

menentang pemerintahan Otoriter bersikap lain teradap pemerintahan Bashar al Assad, hal ini dikarenakan hubungan yang telah terjalin sejak lama akan tetap terlaksana apabila Suriah dipimpin oleh pemerintahan yang berideologikan Syiah. Apabila pemerintahan Bashar di Suriah digantikan oleh pemerintahan yang beraliran Sunni maka kemudahan akses akan perjuangan mempertahankan ideologi Syiah akan sangat berat dan membuat Iran berada dalam posisi sulit untuk lebih bisa berbicara di kawasan Timur Tengah. Sehingga meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya dalam menganut sekte Syi'ah, dimana Iran menganut Syi'ah Imam Keduabelas sedangkan Suriah menganut sekte Syi'ah Zaidiyah, kerjasama serta hubungan antar keduanya tetap dilakukan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari faham yang dianut oleh warga Syi'ah tentang kesetiaan, yaitu Ashabiyah. Kesetiaan terhadap keluarga tertentu yaitu keluarga dan keturunan dari khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi dasar faham ini. Sehingga meskipun sekte mereka berbeda tetapi karena adanya faham Ashabiyah ini, hubungan baik keduanya tetap terjalin hingga kini.